



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 2180-2185

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Ekonomi Politik BUMN: Reformasi, Kepemimpinan Negara, dan Peran BUMN dalam Agenda Pembangunan Nasional

Gita Febrianti, Krisnawati Silaban, Novita Hotma Uli Sitanggang, Armin Rahmansyah Nasution

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

gitafebrianti442@gmail.com, krisnawatisilaban5@gmail.com, novitasitanggang28@gmail.com, armin@unimed.ac.id

Abstrak

Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di negara-negara berkembang seperti Indonesia kini tengah mengalami penguatan kembali, meskipun tren global seringkali lebih menyukai privatisasi akibat wacana neoliberal. Kebangkitan BUMN ini menandai fungsinya sebagai instrumen strategis pemerintah. BUMN secara historis memang bertindak sebagai "tangan yang terlihat" (visible hand) negara, yang menempatkan mereka pada posisi unik. Mereka tidak hanya dituntut untuk beroperasi secara komersial, tetapi juga dibebani tanggung jawab politik untuk mewujudkan sasaran pembangunan, sehingga BUMN harus menavigasi persimpangan kompleks antara logika pasar dan kepentingan publik. Inisiatif reformasi BUMN yang saat ini bergulir tidak dapat dipandang hanya sebagai perbaikan administratif atau tata kelola untuk mengatasi masalah klasik seperti inefisiensi atau korupsi. Reformasi ini pada dasarnya adalah sebuah gerakan ekonomi politik yang terencana. Faktor kunci proses ini adalah kepemimpinan negara (state leadership), di mana visi dan otoritas politik eksekutif menjadi pendorong utama. Kepemimpinan inilah yang mengorkestrasi seluruh proses transformasi, mulai dari konsolidasi hingga penanaman budaya kerja baru, dengan sasaran akhir untuk menjadikan BUMN sebagai alat yang lebih patuh dan efektif dalam menjalankan visi pemerintah. Atas dasar itu, studi ini akan memusatkan perhatian pada bagaimana BUMN yang telah bertransformasi tersebut digunakan sebagai instrumen utama dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional. Penelitian ini akan meneliti keterlibatan BUMN dalam proyek-proyek prioritas, seperti infrastruktur skala besar, program hilirisasi, atau transisi energi. Dengan menerapkan analisis ekonomi politik, studi ini bertujuan untuk mengungkap relasi kekuasaan yang membentuk transformasi tersebut, serta mengidentifikasi konflik inheren yang muncul saat BUMN harus menyeimbangkan perannya sebagai agen pembangunan dan sebagai badan usaha yang ditargetkan untuk profit.

Kata kunci : Ekonomi Politik, BUMN, Reformasi Kelembagaan, Kepemimpinan Negara, Pembangunan Nasional.

1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya strategis suatu negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan kesejahteraan, dan kemandirian ekonomi. Dalam konteks Indonesia, pembangunan tidak hanya bergantung pada mekanisme pasar, tetapi juga pada peran aktif negara dalam mengatur dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Salah satu instrumen utama negara dalam mencapai tujuan tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keberadaan BUMN tidak hanya berfungsi sebagai pelaku bisnis, tetapi juga sebagai agen pembangunan yang berperan dalam penyediaan infrastruktur, layanan publik, serta pemerataan ekonomi di berbagai daerah. Melalui BUMN, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara tujuan ekonomi dan sosial agar pertumbuhan tidak hanya menguntungkan sebagian pihak, tetapi juga berdampak luas bagi masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, peran BUMN sebagai motor pembangunan nasional sering dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan politik. Di satu sisi, BUMN dituntut untuk beroperasi secara profesional, efisien, dan kompetitif layaknya entitas bisnis swasta. Di sisi lain, BUMN juga memiliki mandat sosial dan politik untuk mendukung kebijakan negara, termasuk penyediaan lapangan kerja, stabilisasi harga, serta pembangunan daerah tertinggal. Ketegangan antara orientasi ekonomi dan kepentingan politik inilah yang menjadikan BUMN sebagai objek kajian menarik dalam perspektif ekonomi politik. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan fundamental: sejauh mana BUMN dapat menjalankan peran pembangunan tanpa kehilangan independensi dan efisiensi sebagai entitas ekonomi.

Seiring berjalannya waktu, berbagai kebijakan reformasi BUMN digulirkan untuk memperkuat kinerja dan tata kelola perusahaan milik negara. Reformasi tersebut meliputi restrukturisasi kelembagaan, peningkatan

Ekonomi Politik BUMN: Reformasi, Kepemimpinan Negara, dan Peran BUMN dalam Agenda Pembangunan Nasional

transparansi, serta penerapan prinsip *good corporate governance* agar BUMN mampu bersaing di era ekonomi modern. Reformasi ini menjadi penting karena BUMN tidak hanya mengelola aset strategis negara, tetapi juga berkontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui dividen dan pajak. Meski demikian, proses reformasi seringkali berjalan di bawah bayang-bayang kepentingan politik, baik dalam penentuan kepemimpinan, arah investasi, maupun kebijakan strategis lainnya. Oleh karena itu, efektivitas reformasi BUMN tidak dapat dilepaskan dari sejauh mana pemerintah sebagai pemegang kekuasaan mampu menyeimbangkan antara rasionalitas ekonomi dan kepentingan politik.

Kepemimpinan negara juga memainkan peran sentral dalam menentukan arah dan keberhasilan reformasi BUMN. Setiap perubahan politik dan pergantian pemerintahan membawa pendekatan yang berbeda terhadap pengelolaan BUMN, baik dalam hal orientasi bisnis maupun fungsi sosialnya. Kepemimpinan yang berorientasi pembangunan akan menempatkan BUMN sebagai katalis pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan kepemimpinan yang terlalu politis cenderung menjadikan BUMN sebagai instrumen kekuasaan dan kepentingan jangka pendek. Oleh sebab itu, analisis terhadap kepemimpinan negara menjadi aspek penting dalam memahami dinamika ekonomi politik BUMN di Indonesia, terutama dalam konteks hubungan antara kebijakan publik, kekuasaan politik, dan efektivitas korporasi negara.

Secara keseluruhan, studi mengenai ekonomi politik BUMN menjadi relevan untuk memahami bagaimana kebijakan reformasi, gaya kepemimpinan, dan kepentingan politik berinteraksi dalam menentukan arah pembangunan nasional. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi BUMN sebagai entitas yang berada di antara rasionalitas ekonomi dan realitas politik. Melalui pendekatan ekonomi politik, penelitian ini berupaya menjelaskan bahwa keberhasilan BUMN sebagai agen pembangunan tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh konfigurasi kekuasaan dan kebijakan yang mengitarinya. Dengan demikian, analisis yang komprehensif mengenai reformasi dan kepemimpinan negara terhadap peran BUMN menjadi penting untuk menilai sejauh mana perusahaan milik negara benar-benar berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional dan kebaruan terlihat di sini.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dinamika ekonomi politik di balik peran dan reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam agenda pembangunan nasional. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis konseptual dan interpretatif terhadap berbagai sumber sekunder, seperti buku-buku teori ekonomi politik, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, kebijakan publik, serta dokumen kelembagaan BUMN. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur akademik dan dokumen kebijakan yang relevan, kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama mengenai hubungan antara kepemimpinan negara, arah kebijakan reformasi, dan kontribusi BUMN terhadap pembangunan ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan pola kekuasaan dan kebijakan ekonomi yang membentuk peran strategis BUMN dalam kerangka ekonomi politik Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

a. Reformasi BUMN di Indonesia

Reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya restrukturisasi ekonomi nasional yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing lembaga-lembaga ekonomi milik negara. Dalam kerangka ekonomi politik, BUMN tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen strategis negara dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan publik. Sejak awal reformasi ekonomi pasca-krisis 1998, pemerintah Indonesia telah menempuh berbagai langkah restrukturisasi yang meliputi perbaikan tata kelola, pemisahan fungsi komersial dan publik, serta pembentukan holding berdasarkan sektor strategis seperti energi, pangan, keuangan, dan infrastruktur (Kementerian BUMN, 2023).

Langkah-langkah reformasi ini pada dasarnya didorong oleh dua kebutuhan utama: pertama, meningkatkan efisiensi operasional BUMN yang selama bertahun-tahun menghadapi masalah birokratis dan beban politik; kedua, memperkuat posisi BUMN sebagai pelaku utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Konsep “*value creation*” yang diadopsi oleh Kementerian BUMN menjadi dasar arah reformasi sejak periode 2019, di mana transformasi tidak hanya difokuskan pada perbaikan keuangan, tetapi juga penciptaan nilai sosial dan pembangunan yang

inklusif. Dengan strategi ini, BUMN diharapkan tidak lagi semata-mata mengejar profit, melainkan menjadi katalisator pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat (World Bank, 2019). Reformasi BUMN juga tidak terlepas dari dinamika kepemimpinan politik nasional. Setiap periode pemerintahan membawa orientasi dan prioritas yang berbeda terhadap peran BUMN. Misalnya, pada periode awal reformasi, fokus utama adalah privatisasi dan pengurangan campur tangan politik. Namun, dalam dekade terakhir, arah kebijakan beralih menuju penguatan peran BUMN sebagai “agen pembangunan” yang aktif dalam proyek strategis nasional seperti pembangunan infrastruktur, energi terbarukan, dan digitalisasi layanan publik (Prasetyo, 2021). Transformasi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan neoliberal menuju pendekatan *developmental state*, di mana negara memegang peranan aktif dalam menentukan arah ekonomi melalui kepemilikan dan intervensi di sektor-sektor strategis (Evans, 1995; Weiss, 2003).

Secara empiris, kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional terus meningkat. Berdasarkan laporan Kementerian BUMN (2023), total aset BUMN mencapai lebih dari Rp 9.000 triliun, dengan kontribusi terhadap penerimaan negara dalam bentuk dividen dan pajak mencapai sekitar Rp 400 triliun per tahun. Selain itu, BUMN

juga menjadi penyerap tenaga kerja langsung dan tidak langsung bagi jutaan masyarakat Indonesia, terutama di sektor infrastruktur dan energi. Namun, reformasi juga menghadapi sejumlah tantangan signifikan, seperti inefisiensi struktural, konflik kepentingan politik, dan kesenjangan kinerja antar-holding. Tantangan-tantangan ini menuntut kebijakan tata kelola yang lebih transparan dan berbasis akuntabilitas publik (OECD, 2004). Dari perspektif ekonomi politik, reformasi BUMN di Indonesia mencerminkan tarik-menarik antara kepentingan negara, pasar, dan kelompok kepentingan. Di satu sisi, negara ingin mempertahankan kontrol terhadap sektor strategis untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan ekonomi. Di sisi lain, tekanan globalisasi dan kompetisi pasar mendorong penerapan prinsip-prinsip korporatis yang efisien dan profesional. Oleh karena itu, arah reformasi ke depan memerlukan keseimbangan antara kepentingan politik negara dan logika ekonomi pasar agar BUMN dapat berperan optimal sebagai motor pembangunan sekaligus tetap menjaga mandat sosialnya.

b. Kepemimpinan Negara dan Arah Kebijakan BUMN di Indonesia

Kepemimpinan negara memiliki peran sentral dalam menentukan arah kebijakan dan transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Dalam konteks ekonomi politik, BUMN tidak dapat dilepaskan dari dinamika kekuasaan dan visi pemerintahan yang sedang berkuasa. Setiap periode kepemimpinan nasional membawa orientasi berbeda terhadap bagaimana BUMN diposisikan apakah sebagai agen pembangunan, instrumen stabilitas ekonomi, atau entitas bisnis yang harus bersaing secara profesional di pasar global. Oleh karena itu, perubahan kepemimpinan sering kali diikuti oleh penyesuaian strategi BUMN, baik dari sisi tata kelola, prioritas investasi, maupun struktur kelembagaan (Weiss, 2003).

Pada era reformasi, kepemimpinan pemerintah cenderung menekankan pada transparansi dan efisiensi sebagai pilar utama pembaruan BUMN. Visi ini muncul sebagai respons terhadap kritik publik terhadap praktik-praktik birokratis dan inefisiensi yang menghambat kinerja perusahaan milik negara. Dalam beberapa tahun terakhir, arah kebijakan BUMN semakin menguat ke model *developmental state*, di mana negara secara aktif mengarahkan BUMN untuk menjalankan proyek strategis nasional seperti pembangunan infrastruktur, industrialisasi, dan digitalisasi layanan publik. Model ini memperlihatkan bahwa BUMN bukan sekadar pelaku ekonomi, melainkan perpanjangan tangan negara untuk mengintervensi sektor-sektor strategis demi kepentingan publik (Evans, 1995).

Kementerian BUMN sebagai lembaga pengarah utama memainkan peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Melalui *roadmap* transformasi yang disusun, kementerian menetapkan empat prioritas utama: restrukturisasi organisasi, peningkatan efisiensi keuangan, digitalisasi layanan, dan penguatan nilai sosial. Visi “BUMN untuk Indonesia” menjadi fondasi moral sekaligus politik dalam menjalankan agenda pembangunan yang inklusif. Di bawah kepemimpinan yang kuat dan terkoordinasi, BUMN diarahkan untuk tidak hanya mengejar laba, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, seperti pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan daerah (Kementerian BUMN, 2023).

Data menunjukkan bahwa arah kebijakan ini mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan laporan Kementerian BUMN (2023), total dividen yang disetorkan ke negara meningkat dari sekitar Rp 50 triliun pada awal periode reformasi menjadi Rp 80 triliun dalam dua tahun terakhir. Selain itu, BUMN juga berperan aktif dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mencakup pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, energi, dan transportasi publik. Hingga saat ini, lebih dari 60 persen proyek PSN dijalankan oleh konsorsium BUMN, yang menunjukkan

semakin kuatnya integrasi antara kebijakan negara dan kapasitas operasional perusahaan milik negara. Angka ini menegaskan bahwa kepemimpinan politik yang kuat mampu mengarahkan BUMN untuk menjadi motor pembangunan yang efektif dan terukur (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Namun demikian, intervensi politik yang berlebihan juga berpotensi menimbulkan dilema. Dalam kerangka ekonomi politik, kekuatan negara yang terlalu dominan terhadap BUMN dapat memunculkan masalah *agency conflict*, di mana keputusan bisnis tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan ekonomi, tetapi pada kepentingan politik jangka pendek (Gilpin, 2001). Tantangan ini menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara otoritas politik dan prinsip tata kelola korporasi modern. Transparansi, akuntabilitas, serta evaluasi berbasis kinerja perlu diperkuat agar BUMN tetap adaptif terhadap dinamika ekonomi global tanpa kehilangan orientasi nasionalnya.

c. Peran BUMN dalam Agenda Pembangunan Nasional

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran fundamental dalam mendukung agenda pembangunan nasional Indonesia. Sebagai perpanjangan tangan negara di sektor ekonomi, BUMN berfungsi tidak hanya sebagai pelaku bisnis, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang strategis. Dalam konteks ekonomi politik, keberadaan BUMN mencerminkan fungsi ganda negara sebagai regulator sekaligus aktor ekonomi. Melalui BUMN, pemerintah dapat memastikan bahwa orientasi pembangunan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh mekanisme pasar, melainkan diarahkan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi.

Peran BUMN dalam pembangunan nasional diwujudkan melalui berbagai dimensi. Pertama, dimensi ekonomi, di mana BUMN menjadi motor penggerak pertumbuhan melalui investasi di sektor-sektor prioritas seperti energi, infrastruktur, transportasi, dan pangan. Misalnya, BUMN berperan besar dalam pembangunan jaringan listrik nasional, proyek tol lintas Jawa dan Sumatra, serta pengembangan pelabuhan dan bandara. Berdasarkan data Kementerian BUMN (2023), investasi total BUMN dalam proyek infrastruktur mencapai lebih dari Rp 1.600 triliun, yang tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga mendorong kegiatan ekonomi di daerah-daerah tertinggal. Kedua, dalam dimensi sosial, BUMN berkontribusi melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang kini diselaraskan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Pendekatan ini memperkuat peran BUMN sebagai agen pembangunan yang berorientasi pada nilai sosial (*social value creation*). Beberapa BUMN besar seperti Pertamina, PLN, dan Telkom aktif melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, dan inisiatif ekonomi hijau. Hingga 2023, program TJSL BUMN mencakup lebih dari 12.000 desa binaan di seluruh Indonesia, dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal (Kementerian BUMN, 2023). Ketiga, dalam dimensi strategis dan politik ekonomi, BUMN menjadi instrumen negara dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya di sektor energi dan pangan. Misalnya, dalam kondisi krisis global, BUMN seperti Pertamina dan Bulog berperan sebagai stabilisator harga energi dan bahan pokok. Peran ini menunjukkan bahwa BUMN bukan hanya entitas ekonomi yang berorientasi laba, melainkan bagian dari mekanisme pertahanan ekonomi nasional. Dalam banyak kasus, kemampuan negara untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi sangat bergantung pada kapasitas dan efisiensi BUMN dalam melaksanakan fungsi strategisnya.

Selain itu, BUMN juga menjadi katalis penting dalam proses transformasi digital ekonomi nasional. Melalui BUMN digital seperti Telkom dan BRI, pemerintah mendorong adopsi teknologi untuk memperluas akses keuangan dan komunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Program *BRI Digital Banking* dan *Telkom Indonesia Smart City* merupakan contoh konkret bagaimana BUMN mendukung agenda digitalisasi dan inklusi ekonomi.

Data menunjukkan bahwa hingga akhir 2023, lebih dari 30 juta pelaku UMKM telah terhubung dengan platform digital BUMN, membantu memperluas pasar dan meningkatkan daya saing nasional (World Bank, 2022). Secara keseluruhan, kontribusi BUMN terhadap agenda pembangunan nasional mencerminkan sinergi antara kepentingan ekonomi, sosial, dan politik. Melalui investasi strategis, penciptaan lapangan kerja, penguatan infrastruktur, serta implementasi kebijakan sosial, BUMN menjadi fondasi penting dalam pembangunan berkelanjutan. Namun, agar peran ini tetap efektif, diperlukan penguatan tata kelola, peningkatan transparansi, dan konsistensi kebijakan antar-kementerian. Dengan tata kelola yang baik dan arah kebijakan yang jelas, BUMN dapat terus menjadi instrumen utama negara dalam mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan.

d. Sintesis Ekonomi Politik BUMN di Indonesia

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia merupakan entitas yang berada di persimpangan antara ekonomi dan politik, sehingga studi tentang BUMN tidak hanya relevan dari perspektif bisnis, tetapi juga dari perspektif

ekonomi politik. Dalam hal ini, BUMN dipahami sebagai instrumen strategis negara yang digunakan untuk mengatur dan mengarahkan sumber daya ekonomi demi kepentingan nasional, sekaligus sebagai sarana bagi pemerintah untuk menjalankan agenda pembangunan yang lebih luas. Dengan kata lain, posisi BUMN melampaui sekadar entitas ekonomi; keberadaannya juga menandai hubungan kekuasaan, regulasi, dan intervensi politik dalam perekonomian nasional. Reformasi BUMN menjadi titik fokus dalam menilai dinamika ekonomi politik di Indonesia. Sejak era reformasi pasca-krisis, pemerintah mengambil langkah restrukturisasi yang signifikan, termasuk perbaikan tata kelola, profesionalisasi manajemen, dan pembentukan holding perusahaan berdasarkan sektor strategis. Langkah ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga memastikan BUMN dapat menjalankan mandat sosial dan strategis secara efektif. Dalam perspektif ekonomi politik, reformasi ini menunjukkan bagaimana negara menggunakan instrumen ekonomi untuk mencapai stabilitas politik dan pertumbuhan nasional, sekaligus menyeimbangkan kepentingan berbagai aktor, termasuk masyarakat, pasar, dan pemerintah sendiri.

Kepemimpinan negara memegang peranan penting dalam menentukan arah reformasi dan kebijakan BUMN. Setiap periode pemerintahan membawa prioritas berbeda terhadap bagaimana BUMN harus beroperasi apakah lebih difokuskan pada pencapaian keuntungan finansial, pelayanan publik, atau keduanya secara bersamaan. Kepemimpinan yang visioner memungkinkan BUMN tidak hanya menjadi pengelola aset negara, tetapi juga sebagai katalisator pembangunan yang mampu menjawab tantangan ekonomi domestik maupun global. Misalnya, BUMN terlibat langsung dalam proyek infrastruktur, energi terbarukan, telekomunikasi, serta digitalisasi ekonomi, yang semuanya merupakan prioritas pembangunan nasional sekaligus instrumen politik untuk memperkuat legitimasi pemerintah (Kementerian BUMN, 2023). Selain itu, BUMN berperan sebagai instrumen stabilisasi ekonomi dan sosial. Dalam situasi ketidakpastian ekonomi atau fluktuasi harga global, BUMN seperti Pertamina dan Bulog berfungsi sebagai stabilisator pasar untuk energi dan pangan. Fungsi ini menunjukkan bahwa intervensi negara melalui BUMN tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga strategis dan politis, karena memastikan ketersediaan barang publik yang vital dan mencegah ketidakstabilan sosial akibat gejolak harga. Dari perspektif ekonomi politik, ini menegaskan bahwa BUMN adalah alat negara untuk memadukan kekuatan pasar dengan kepentingan nasional, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Tantangan yang dihadapi BUMN dalam kerangka ekonomi politik mencakup konflik

kepentingan, tekanan politik, ketidakmerataan kapasitas manajerial, dan kebutuhan adaptasi terhadap dinamika pasar global. Meskipun pemerintah telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, tekanan politik tetap dapat memengaruhi keputusan bisnis dan alokasi sumber daya. Oleh karena itu, keberhasilan BUMN sebagai aktor ekonomi-politik sangat bergantung pada keseimbangan antara intervensi negara, efisiensi operasional, dan orientasi sosial. Sinergi ini memungkinkan BUMN untuk menjadi agen pembangunan yang tangguh, adaptif, dan inklusif, sekaligus menjaga kedaulatan ekonomi negara.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia berperan sebagai aktor yang berada di persimpangan antara ekonomi dan politik. Keberadaan BUMN tidak hanya sebagai entitas bisnis yang berorientasi laba, tetapi juga sebagai instrumen strategis pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Dari perspektif ekonomi politik, posisi BUMN mencerminkan interaksi kompleks antara kekuasaan negara, mekanisme pasar, dan kepentingan publik, sehingga reformasi dan kebijakan yang diterapkan tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang membentuk arah dan prioritas pembangunan. Reformasi BUMN telah menekankan pentingnya perbaikan tata kelola, profesionalisasi manajerial, dan restrukturisasi kelembagaan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan. Namun, tantangan masih tetap ada, terutama terkait campur tangan politik, kesenjangan kapasitas manajerial, serta kebutuhan untuk beradaptasi dengan persaingan global dan disrupsi teknologi. Dalam konteks ini, keberhasilan BUMN sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menyeimbangkan intervensi negara dengan prinsip tata kelola korporasi modern, sehingga perusahaan negara dapat menjalankan mandat ekonomi dan sosialnya secara efektif. Peran BUMN dalam agenda pembangunan nasional terlihat pada tiga dimensi utama: ekonomi, sosial, dan strategis. Secara ekonomi, BUMN menjadi motor penggerak pembangunan infrastruktur, energi, dan telekomunikasi, sekaligus menyerap tenaga kerja dalam skala besar. Secara sosial, BUMN berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dari sisi strategis, BUMN berfungsi sebagai stabilisator pasar dan penyedia layanan publik penting, sehingga keberadaannya bukan sekadar finansial, tetapi juga politis dan strategis bagi negara. Dengan demikian, BUMN dapat dianggap sebagai alat ekonomi-politik yang

memungkinkan pemerintah untuk mengintegrasikan tujuan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan sosial dan stabilitas nasional. Sinergi antara reformasi internal BUMN, kepemimpinan negara yang visioner, dan kebijakan publik yang konsisten menjadi kunci agar BUMN tetap relevan, tangguh, dan adaptif terhadap perubahan global. Ke depan, BUMN berpotensi menjadi agen pembangunan yang lebih inklusif, modern, dan efisien, asalkan prinsip efisiensi, transparansi, dan orientasi publik tetap dijaga dalam setiap kebijakan dan implementasinya.

Referensi

1. *APBN Kita: Kontribusi BUMN terhadap Pendapatan Negara*. Jakarta: Kemenkeu.
2. Burns, J. M. (1978). *Leadership*. New York: Harper & Row.
3. Evans, P. (1995). *Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
4. Gilpin, R. (2001). *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
5. Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
6. Johnson, C. (1982). *MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925–1975*. Stanford, CA: Stanford University Press.
7. Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. (2023). *Laporan Kinerja Kementerian BUMN*. Jakarta: Kementerian BUMN.
8. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *APBN Kita: Kontribusi BUMN terhadap Pendapatan Negara*. Jakarta: Kemenkeu.
9. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2004). *OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264015999-en>
10. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2004). *OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: OECD Publishing.
11. Prasetyo, A. D. (2021). Ekonomi politik dan tata kelola BUMN di Indonesia: Antara efisiensi dan intervensi politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 8(2), 145–160.
12. Strange, S. (1994). *States and Markets: An Introduction to International Political Economy*. London: Pinter Publishers.
13. Suryahadi, A., & Hadiwidjaja, G. (2020). Reformasi BUMN dan Tantangan Tata Kelola di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(3), 201–219.
14. Weiss, L. (2003). *States in the Global Economy: Bringing Domestic Institutions Back In*. Cambridge University Press.
15. World Bank. (2019). *State-Owned Enterprises: Catalysts for Public Value Creation?* Washington, D.C.: World Bank Group.